

STUDI PENDIDIKAN MANCANEGARA JERMAN DAN INDONESIA

1. PENDAHULUAN

Pendidikan telah menjadi sebuah keniscayaan bagi peningkatan kualitas kehidupan baik secara individual maupun kolektif. Keyakinan akan urgensi pendidikan telah mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyesuaian terhadap keunikan setiap komunitas yang umumnya terkait dengan nilai, ritual, teladan dan simbol (Hofstede 2001: 9), setiap bangsa mengembangkan sistem pendidikan yang dipandang unggul dan mampu menjadi sarana yang ideal bagi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Saat ini bisa kita lihat beragam sistem pendidikan di dunia, yang seringkali dibangun berdasar prinsip pendidikan yang persis sama, namun tetap kaya dengan perbedaan di berbagai tingkatan kebijakan dan teknis pelaksanaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong para penggiat pendidikan untuk meninggalkan pola pandang sempit dalam mengembangkan sistem pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat melalui kaca mata kuda, dimana para pengambil kebijakan di bidang pendidikan hanya terfokus pada sistem pendidikan sendiri. Semakin berkembang kesadaran bahwa pola pandang egosentris hanya akan menjadikan sistem pendidikan sebuah bangsa rentan terhadap resiko stagnasi pendidikan yang akan menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi terhambat akibat tidak adanya upaya *benchmarking* dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pihak lain. Tanpa ada bandingan, kerap seseorang terjebak dalam pola pandang “baik sendiri”.

Sekait dengan tumbuhnya kesadaran ini, berkembang pemahaman mengenai upaya membandingkan sistem pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan lainnya. Tujuan utama dari studi komparatif ini adalah melakukan upaya *benchmarking* agar posisi sistem pendidikan yang ada di negeri sendiri bisa diketahui. Dengan demikian, penguatan keunggulan dan perbaikan kelemahan akan dapat dilakukan secara akurat, efektif dan efisien (lihat Syah Nur: 2003). Dalam skala yang lebih kecil, sebuah lembaga pendidikan dapat mengambil perbandingan dengan lembaga pendidikan lain

yang berada dalam tingkatan yang sama atau lembaga pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan mengambil perbandingan lembaga lain yang juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama.

Seiring dengan derasnya arus tukar informasi mengenai sistem pendidikan yang beragam di berbagai kawasan, bahkan saat ini sampai yang bersifat mondial, berkembang pula sebuah disiplin baru yang dipandang mulai berperan nyata sejak 1960, yang disebut dengan *comparative education* (Syah Nur 2003:1). Tujuan dari *comparative education* utamanya adalah untuk mengetahui berbagai macam perbedaan yang berimbas pada berbedanya sistem pendidikan di dunia, dengan kata lain, bertujuan untuk mengetahui berbagai prinsip yang mendasari pengaturan perkembangan sistem pendidikan nasional (lihat Syah Nur 2003:4). Pada gilirannya upaya-upaya memahami beragam sistem pendidikan di berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan dan perbaikan pendidikan di banyak negara. Saat ini komunitas yang mempunyai fokus kinerja *comparative education* telah terbentuk di banyak negara. Organisasi yang bergerak pada awal maraknya disiplin ini adalah “*Comparative Education Society*” di Amerika Serikat dan “*Comparative and International Education Society*” di Kanada. Di Indonesia, wadah para penggiat *comparative education* adalah “*Conference Comparative Education Society of Indonesia* (CESSIA).

Dalam kesempatan ini kami akan mencoba mengkaji banding sistem pendidikan Jerman dengan beberapa catatan dalam sistem pendidikan Indonesia. Negara Jerman dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem pendidikannya. Saat ini, Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, “hanya” sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II (Institut für Auslandsbeziehungen: 1986). Berbagai keunggulan Jerman di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan Jerman yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II. Tak aneh bila saat ini Jerman menjadi negara tujuan bagi banyak mahasiswa internasional, termasuk Amerika Serikat, yang ingin mendapatkan salah satu pendidikan terbaik di dunia.

Tujuan dari kaji banding ini adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem pendidikan di kedua negara. Mengkaji perbedaan tersebut berdasarkan prinsip studi perbandingan dan pada gilirannya diharapkan mampu memperoleh hasil-hasil kaji banding yang mampu memberikan kontribusi berupa saran bagi upaya pengembangan sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik.

2. PEMBAHASAN

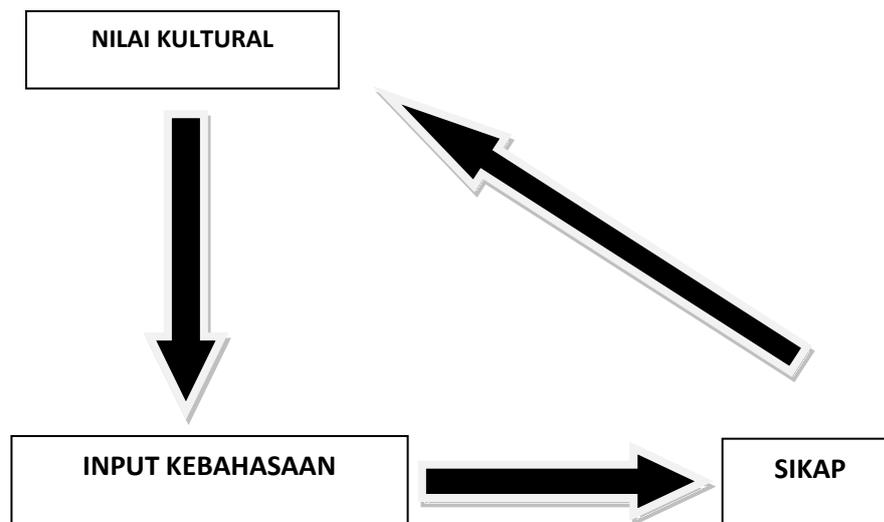
Sistem pendidikan akan senantiasa bersifat *mobile*, dalam arti mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan bukan merupakan bidang mandiri yang lepas dari pengaruh faktor-faktor eksternal. Sistem pendidikan merupakan hal yang mempunyai kaitan erat dengan banyak bidang lain dalam kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai bangsa. Sebagai gambaran, perbandingan pendidikan di negara-negara Arab cenderung mengedepankan konteks keagamaan, bahasa dan latar belakang budaya dalam kajian-kajiannya. Fenomena ini muncul karena adanya kesamaan karakteristik dari semua negara arab. Kajian-kajian di kawasan ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang bernuansa keagamaan bagi pengembangan sistem pendidikan di negara masing-masing. Di kawasan Asia kajian mungkin lebih mengarah kepada bidang manajemen sistem pendidikan dan kualitas pengajar. Hal ini terungkap dari pendapat yang dikemukakan oleh mantan presiden *Conference Comparative Education Society of Asia (CESA)* Fakry Gaffar pada saat pendeklarasian CESSIA di Universitas Negeri Jakarta bulan Februari 2009. Dengan demikian jelaslah bahwa pembicaraan mengenai sistem pendidikan akan senantiasa beriringan dengan pembicaraan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah ideologi. Ideologi sebagaimana diungkapkan oleh Lin- Huber (1998) merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem budaya. Ideologi ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai ilustrasi, pendidikan di Indonesia memandang esensial untuk tetap membudayakan kesopanan di atas kebersamaan (*politeness above solidarity*) antara guru dan murid, sehingga budaya memanggil guru dengan sebutan penghormatan seperti bapak/ibu, sikap gestur yang khas dan keengganan mendebat pendapat guru menjadi semacam

tradisi yang dipertahankan, sedangkan di Jerman seorang mahasiswa yang merasa sudah dekat dengan seorang dosen boleh memanggil nama dosen tanpa embel-embel, bahkan diperkenankan untuk menyebut dosen dengan nama sapaan akrab, seperti misalnya Dorothea disapa Doro. Format diskusi juga relatif lebih egaliter.

“Die Werte einer Kultur beeinflussen die Sprachpraktiken der Betreuungspersonen. Diese Sprachpraktiken wiederum haben Auswirkungen auf das kindliche Verhalten”

Secara sederhana, pendapat Lin- Huber ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Untuk memperoleh gambaran mengenai ideologi yang dijadikan sebagai panutan, maka ada baiknya kita bahas beberapa hal yang mempunyai penjelasan historis yang berimbas pada pembangunan sistem pendidikan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.

2.1. Landasan Filosofis dan Kebijakan Sistem Pendidikan

Untuk memahami perbedaan yang ada antara sistem pendidikan Jerman dan sistem pendidikan Indonesia, akan sangat baik bila kita terlebih dahulu melihat landasan filosofis yang mendasari kedua sistem pendidikan tersebut. Membicarakan sistem pendidikan dari sisi filosofis akan cenderung terkait dengan nilai ideal yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kinerja. Sebagai contoh, Pancasila yang dijadikan landasan filosofis bangsa Indonesia diharapkan menjadi salah satu pedoman hidup dari bangsa yang terdiri atas beragam latar belakang agama dan suku bangsa ini.

Munculnya berbagai bidang filsafat mengakibatkan adanya perbedaan dalam beragam sistem pendidikan di dunia, tergantung filsafat apa yang dijadikan landasan pembentukannya. Alwasilah (2007:15) mengemukakan bahwa masyarakat cenderung memilih filsafat yang dipercayainya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan dan bersifat kolektif. Karakter masyarakat (dalam ranah yang luas bisa disebut sebagai bangsa) akhirnya bisa dikenali dari filsafat apa yang mereka jadikan landasan bagi semua kinerja kemasyarakatan. Pada gilirannya, filsafat juga akan mempengaruhi pendidikan dalam komunitas terkait. Kurikulum adalah cerminan filsafat yang dipercayai oleh masyarakatnya (Alwasilah 2007:16). Dengan demikian, penyusunan kurikulum akan senantiasa berkaitan dengan tiga bidang filsafat, yaitu *ontology* yang berkaitan dengan hakikat realita, *epistemology* yang membahas hakikat pengetahuan, dan *axiology*, bidang filsafat yang mengkaji permasalahan nilai.

Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan negara yang kalah perang. Kondisi ini mempengaruhi mental rakyatnya yang begitu mengidamkan adanya pemimpin yang bisa membawa mereka menuju kejayaan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Hitler. Setelah berkuasa, Hitler menanamkan keyakinan dan kebanggaan yang chauvimistik kepada para pendukungnya. Untuk memperoleh dukungan luas bagi ambisinya menguasai Eropa, Hitler menentang konsep *Lebensraum* dan keunggulan ras bangsa Jerman, ras Arya. Rasionalisasi fasis ini kemudian melandasi sistem pendidikan Jerman saat itu. Pendidikan diarahkan kepada pembentukan sosok manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Dalam bidang keilmuan, pendidikan diarahkan pada penemuan-penemuan ilmiah, utamanya yang bermanfaat bagi pembangunan kekuatan militer Jerman, bidang olahraga bertujuan memunculkan atlet-atlet yang superior seperti juara tinju dunia Max Schmelling. Dalam bidang seni, pembuatan karya seni ditujukan untuk membentuk figur ras Arya yang unggul.

Kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II membuat perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jerman, termasuk pada perubahan filsafat yang dijadikan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan. Berbagai kondisi buruk yang terjadi pasca kekalahan, termasuk terbagi duannya negara Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi awal bagi bangsa Jerman untuk mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Jerman kemudian memandang persatuan (*Einheit*), pembagian kekuasaan agar tidak

tertumpuk pada satu orang (*die Macht verteilen*), dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami kehancuran. Dalam pandangan ini bisa kita lihat pengaruh filsafat *Eksistensialisme* yang menekankan kemampuan diri sendiri, filsafat *progresivisme* dengan proporsi sains dan perubahan yang terencana, juga pengaruh filsafat *critical pedagogy* dalam upaya memformulasi ulang kebenaran setelah kehancuran akibat ideologi nazi. Beragamnya landasan filsafat sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem federal. Dalam sistem ini, negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di beberapa negara bagian berbeda dengan satu sama lain.

Pengaruh dari perubahan landasan filsafat pendidikan ini pada gilirannya berimbas pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan federal maupun pemerintahan negara bagian dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas.

- a. Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah Jerman juga mengalokasikan dana yang relatif besar bagi penyediaan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik.
- b. Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian. Pembagian kewenangan ini mengarah kepada upaya untuk tidak menumpukkan kekuasaan di satu pundak, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau pengambilan kebijakan pendidikan yang lemah, tidak akan berimbas secara global. Di sisi lain, keuntungan pembagian kewenangan ini memberikan kesempatan bagi pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah, namun untuk menciptakan standarisasi nasional, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk meregulasi beberapa hal dalam sistem pendidikan Jerman.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar. Dibandingkan dengan Indonesia, partisipasi masyarakat Jerman jauh lebih terlihat.

Hal ini mencerminkan pemikulan tanggung jawab bersama dan rasa kesatuan antara pemerintah dengan masyarakatnya.

- d. Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur. Pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masa depan.
- e. Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang *nyambil* menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang dimilikinya.

Umumnya semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran yang tinggi di antara para penggiat pendidikan, rasa tanggung jawab yang dimiliki semua elemen masyarakat dan pengawasan yang mapan.

Kajian kontrastif dengan Indonesia.

Secara falsafi, landasan sistem pendidikan Jerman dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Hal ini terjadi karena pendidikan di manapun adalah hal yang dianggap baik. Pendidikan sejak dulu sampai saat ini di manapun dipandang sebagai sesuatu yang mulia (Alwasilah 2007:15). Di samping itu, kemiripan latar belakang mestinya juga bisa menimbulkan keinginan yang sama. Jerman mengalami kekalahan total karena kekalahan dalam Perang Dunia II, sehingga sempat diduduki oleh kekuatan militer asing dan Indonesia pernah dijajah oleh militer asing. Memang tidak sama antara kekalahan dan penjajahan, namun keduanya melahirkan kondisi mental yang cenderung sama, yaitu adanya ketidaksenangan karena pihak lain mengatur 'rumah tangga' sendiri dan keinginan untuk mandiri atau merdeka.

Kesamaan ini tampak dari keinginan kedua bangsa untuk mengedepankan rasa keadilan dengan memberikan akses pendidikan secara merata. Di Indonesia, pemerataan ini tampaknya baru bisa dicantumkan dalam undang-undang dan belum bisa dilaksanakan secara merata di seluruh bagian negeri. Istilah “memisahkan jurang si kaya dan si miskin” yang didengung-dengungkan sejak jaman orde baru, dan tercermin salah satunya dengan mewajibkan pemakaian seragam yang sama secara nasional tidak menutup mata kita untuk menyaksikan, bahwa sistem pendidikan kita untuk sekian lama justru memperbesar jurang si kaya dan si miskin. Si kaya yang punya akses menuju pendidikan yang baik dari tingkat SD apalagi pendidikan tinggi, si kaya yang bisa fokus belajar karena tidak harus membantu ekonomi orang tuanya yang berupaya bertahan hidup, maka si kaya pula yang memperoleh peluang untuk mendapatkan semua lapangan pekerjaan yang upahnya bisa meningkatkan taraf hidup. Umumnya dokter, ahli hukum dan teknolog bukanlah orang yang berasal dari keluarga miskin.

Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan masih merupakan pembicaraan yang melibatkan banyak perbedaan pemahaman. Bagaimanapun, kewenangan pengaturan sistem pendidikan di Indonesia masih berbeda dengan di Jerman. Keterlibatan masyarakat juga merupakan hal yang oleh sebagian orang dianggap tabu. Ada elemen-elemen masyarakat yang menyerukan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dalam arti pemerintahlah yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membiayainya secara penuh, dan masyarakat hanya berperan sebagai penikmat.

Satu permasalahan klasik yang cukup mengganggu rasa keadilan kita adalah kualifikasi guru yang masih perlu dibenahi. Untuk sekian lama, kesejahteraan guru cukup berada dalam buaian para politikus saja. Seorang guru harus meluangkan waktunya untuk bidang pendidikan dan upaya memenuhi kebutuhan primer dalam hidupnya, yaitu pangan. Kebijakan yang diambil juga belum bisa dilaksanakan secara optimal di lapangan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yang ada, mulai dari lemahnya anggaran, pengawasan dan kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Hari ini *insya Allah*, kita menjadi saksi optimis akan kebangkitan sistem pendidikan Indonesia. Alokasi pendidikan yang meningkat, upaya memenuhi pemerataan akses kepada pendidikan melalui pembangunan desa tertinggal dan pembebasan biaya sekolah sampai tingkat menengah, dan sertifikasi guru serta dosen

kita harapkan mampu menjadi *starting point* bagi pembentukan sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.

2.2. Sistem Pendidikan Jerman

2.2.1 Politik dan Pendidikan

Dengan sejarah kelam yang bertumpu pada pengalaman kekalahan dalam dua perang dunia dan hancurnya negara Jerman, masyarakat Jerman mulai membangun sistem pendidikan yang terbebas dari potensi membuat kesalahan serupa, yaitu dengan memisahkan kekuasaan, termasuk dalam bidang pendidikan, agar tidak tertumpu pada satu lembaga atau satu orang saja. Hal ini dilakukan karena memandang pengaruh absolut Hitler yang membuat seluruh Jerman bergerak ke arah kehancuran. Pendidikan diarahkan kepada penanaman kemauan yang kuat untuk bangkit dan keahlian yang dibutuhkan untuk kembali berdiri sebagai negara yang kokoh dan mandiri. Di samping itu, terpecahnya Jerman menjadi dua bagian untuk waktu yang lama menjadikan isu persatuan sebagai salah satu isu penting dalam budaya pendidikan Jerman.

Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama, dalam hal ini gereja. Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara (Nur Syah 2001:156).

Undang-undang dasar menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak.

Saat ini, wajib belajar berlangsung mulai usia 6 tahun sampai 18 tahun, jadi selama 12-13 tahun. Untuk memenuhi wajib belajar harus dikunjungi sebuah sekolah penuh-waktu selama 9 tahun (di negara bagian tertentu 10 tahun) dan setelah itu memasuki sekolah kejuruan paruh waktu dan sekolah penuh-waktu yang lain. Dengan demikian, sistem pendidikan Jerman di beberapa negara bagian membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan Indonesia. Bila di Indonesia dari SD sampai dengan siap

mengikuti kuliah membutuhkan waktu 12 tahun, di Jerman dibutuhkan 13 tahun untuk menyelesaikan sekolah.

2.2.2 Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi

Kindergarten (Taman Kanak-Kanak) dimulai dari umur 3-6 Tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Vorschulische Einrichtungen*", yang berarti "Persiapan sebelum Pendidikan". Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya "Kindergarten". Penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial dan komune, kadang-kadang juga perusahaan dan perkumpulan.

Setelah *Kindergarten* dimulai pendidikan dasar pada usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Grundschule*", yang berarti "Sekolah Dasar". Dari *Grundschule*, seseorang mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut :

1. *Hauptschule* (kelas 5 – 9/10)
2. *Realschule* (kelas 5 – 10)
3. *Gesamtschule* (kelas 5 – 13)
4. *Gymnasium* (kelas 5 – 13)

Untuk memasuki *Hauptschule*, *Realschule* atau *Gymnasium*, seseorang harus melalui "*Orientierungsstufe*" (Tahapan Orientasi). Di tahap ini diteliti bakat dan kemampuan dari anak, dan tahap ini menentukan kemana tujuan seorang anak selanjutnya. *Hauptschule* dan *Realschule* lebih ditekankan kepada anak yang ingin langsung kerja bila telah menyelesaikan sekolah. Tentu saja setelah melalui pendidikan di "*Berufsfachschule*" atau "*Fachoberschule*". Bagi yang ingin melanjutkan ke Universitas, jalan tercepat adalah melalui *Gymnasium*. Jalan pendidikan lain juga dapat mengikuti kuliah di universitas, tapi dengan melalui jalan yang panjang. Misal harus melakukan praktek kerja dahulu selama sekian tahun.

Sebelum memasuki kuliah, para pria di Jerman diwajibkan untuk memasuki "Wajib Militer". Bila seseorang dengan alasan kesehatan tidak dapat mengikuti "Wajib Militer" maka sebagai gantinya ia harus menjalani "*Zivilliansdienst*" atau lebih dikenal

dengan Zivis. Zivis ini bekerja di rumah sakit, badan sosial ataupun badan pendidikan dari pemerintah.

Titel yang didapat dari Universitas di Jerman dan Indonesia hampir mirip, namun walaupun namanya sama berbeda tingkatannya. Diplom lulusan Jerman setara dengan S2 atau Master di Indonesia, dan dapat langsung mengikuti program Doktoran (PhD). Hal ini berarti S1 di Indonesia, pada dasarnya setara dengan *Vordiplom* di Jerman, tetapi hal ini tergantung dari *Anerkennung der Studienleistungen* (Penyamaan derajat Ijasah). Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu:

- a. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap setara dengan *Vordiplom* (semester 5). Untuk mendapatkan Diplom, ia harus mengikuti semua mata kuliah dari semester 5 sampai dengan pembuatan *Diplomarbeit* (Penulisan Akhir untuk mendapatkan gelar Diplom)
- b. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5. Untuk mendapatkan Diplom, ia hanya diminta untuk mengikuti beberapa ujian untuk penyamaan derajat.
- c. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap sudah mencukupi untuk dapat langsung mengikuti program Doktoran. Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai kemungkinan untuk langsung promosi (S3). Biasanya kalau bidang studi dan kurikulum dari S1 ke promosi (S3) tidak menyimpang jauh, akan mendapat kemudahan pada saat *Anerkennung*.

Di Jerman dikenal ada dua (2) jenis pendidikan tinggi utama: yaitu *Fachhochschule* dan *Universität*. *Fachhochschule* yang sering disebut juga FH ini mirip semacam politeknik di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang aplikasi. Bidang teori lebih sedikit dibandingkan dengan praktek atau aplikasinya. Studi di *Fachhochschule* tak dapat mencapai gelar doktor dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri langsung. Jenis pendidikan tinggi lainnya adalah *Musikhochschule* (untuk bidang musik), *Pedagogische Hochschule* (untuk bidang pendidikan, mirip IKIP dahulu) dan *Kunsthochschule* (untuk bidang seni). Sistem *Universität* (Universitas) di Jerman, berbeda dengan di Indonesia, tidak ada "panduan" ketat per semesternya, dan urutan mata kuliah A, B, C, dst. Hal ini

berarti bahwa mahasiswa dituntut harus dapat menentukan sendiri, kuliah, latihan, seminar, ujian yang akan diikutinya, dll. Hal ini secara langsung memberikan "kebebasan yang sangat besar", tapi bisa juga menjerumuskan" mahasiswa ke kondisi kelewat santai (banyak beberapa mahasiswa Indonesia yang terjebak ke situasi ini, dimana sudah 8 tahun tapi belum ujian apa-apa, karena keasikan kerja atau kesibukan lainnya). Mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang dia ikuti, dan apa yang dia lakukan dan dia mau. Terkadang perkuliahan dilakukan dalam ruang auditorium besar (sampai 600 siswa), sehingga kesiapan "mental" mahasiswa untuk belajar mandiri perlu benar-benar dipertimbangkan bila memilih kuliah di Universitas. Kuliah rata-rata dilakukan dalam bahasa Jerman. Walau demikian di beberapa Universitas (seperti di Universitas Bielefeld, Universitas Bremen, dll) ada juga beberapa kuliah yang dilakukan dalam bahasa Inggris.

Model perkuliahan tersusun dari *Vorlesung* (perkuliahan), *Seminar* (semacam diskusi dalam ukuran kecil atau dalam kelompok kecil), dan *Übung* (latihan). Ujian dilakukan langsung dengan Profesor yang bersangkutan. Rata-rata ujian bersifat lisan, walau ada juga yang diberikan secara tulisan. Sistem ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang (untuk mata kuliah yang tidak lulus), namun sering juga hanya sekali saja (boleh mengulang namun tahun berikutnya. bukan semester berikutnya).

Sistem *Fachhochschule* (nama internasionalnya sekarang sering disebut sebagai *University of Applied Science*) lebih diatur secara ketat mirip dengan sistem perkuliahan di Indonesia, misal urutan perkuliahan, praktek, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua lembaga pendidikan tinggi tersebut, mana yang lebih baik dan cocok, ini bergantung dengan tujuan sekolahnya. *Fachhochschule* rata-rata disukai oleh orang Jerman yang ingin langsung bekerja di industri, sedangkan Universitas lebih disukai bagi mereka yang ingin berkarir di bidang riset dan pengembangan, atau di bidang akademik. Berdasarkan pemantauan dan perkenalan dengan beberapa mahasiswa dari Indonesia, sebagian besar mahasiswa Indonesia lebih suka mengambil pendidikan *Fachhochschule* ini. Hal ini selain alasan waktu serta biaya juga karena mereka ingin cepat bekerja.

Secara "gengsi" memang masih ada anggapan di masyarakat Jerman bahwa Universitas lebih "bergengsi" daripada *Fachhochschule*. Hal ini dikarenakan rata-rata

Profesor atau Doktor kelas pertama (1) di Jerman banyak yang berada di Universitas (bekerja), tetapi anggapan ini mulai bergeser dengan makin majunya sistem di *Fachhochschule* sekarang (termasuk staff-nya yang makin berkualitas). Selain itu makin digemarinya *Fachhochschule* oleh masyarakat dikarenakan juga materinya yang lebih siap diterapkan untuk bekerja, serta adanya kerjasama antara Universitas dan *Fachhochschule* yang ada untuk menyediakan pengajar dan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa. Seperti *Fachhochschule* di Bielefeld dengan Universitas Bielefeld relatif memiliki staff pengajar, yakni Profesor yang sama, akses ke fasilitas (laboratorium dan perpustakaan) juga sama. Hal seperti inilah yang jarang terjadi di Indonesia. atau bahkan dapat dikatakan sulit diwujudkan di dunia pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya potensinya sama dengan pendidikan di Jerman, sehingga pendidikan tinggi di Jerman, mempunyai suatu yang khas, hanya yang berbeda mekanisme pendidikan yang ditawarkan. Bagi yang suka "kebebasan" silahkan masuk ke Universitas, namun bagi yang suka "tuntunan" dipersilahkan masuk ke *Fachhochschule*, sehingga dapat segera bekerja dan mendapatkan gaji seperti yang diidam-idamkan. Beberapa *Fachhochschule* sekarang sudah menawarkan juga "*International Master*" yang menggunakan program berbahasa Inggris.

Suatu ciri khas belajar di Jerman adalah soal biaya pendidikan tiap semesternya. Untuk semua jenis sekolah publik tidak dipungut biaya. Sarana pelajaran, terutama buku ajar, sebagian diberikan kepada peserta secara cuma-cuma. Pelajaran agama, kecuali di sekolah netral. Menurut undang-undang merupakan pelajaran kokurikuler. Di kebanyakan negara bagian didirikan sekolah Kristen bersama. Keistimewaan ini juga terdapat di negara lain seperti Austria dan negara-negara Skandinavia. Pada saat ini sudah mulai banyak beberapa negara bagian di Jerman mendiskusikan tentang biaya kuliah untuk tahun-tahun mendatang. Apakah Jerman masih tetap mempertahankan keistimewaan ini atau secara bertahap melakukan pembaharuan peraturannya, dengan kata lain sudah tidak gratis lagi. Hal ini masih dalam tahap wacana.

Pada universitas swasta dan program internasional (MBA) biaya pendidikannya tidak lagi gratis. Pada saat ini lembaga tersebut masih sedikit jumlahnya. Sesungguhnya biaya kuliah di Jerman relatif rendah (hampir berarti tak perlu bayar SPP), baik untuk warga negara Jerman, ataupun mahasiswa asing. Biasanya mahasiswa hanya perlu membayar uang yang namanya "*Sozialgebühren*". Ini untuk mendapatkan beberapa fasilitas bagi mahasiswa, misal agar bisa makan di MENSEA (kantin khusus mahasiswa

yang ada di kampus-kampus di Jerman) dengan harga mahasiswa, di beberapa negara bagian, tiket kereta, bus dan trem tak perlu bayar. *Sozialgebühren* ini sekitar 100 Euro/semester. Sebagai gambaran di Universitas Bremen, kalau kita makan di MENZA, sekali makan dengan tarif mahasiswa hanya membayar 1,3 Euro, tetapi bila kita sebagai pegawai Universitas atau orang luar yang ikut makan, dikenakan biaya 3,5 Euro.

2.2.3 Manajemen Pendidikan

Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara bagian. Saat ini, negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian mendorong pihak negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan federal (Nur Syah 2001:165-166).

Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan biaya personil yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggungjawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian.

2.3 Kaji komparatif dengan Sistem Pendidikan Indonesia

Bagian ini akan mencoba mengupas beberapa permasalahan pendidikan yang dikritisi oleh sejumlah pihak yang menaruh perhatian pada sistem pendidikan nasional. Kajian tidak diarahkan kepada sikap justifikatif kepada sistem pendidikan sendiri, namun lebih cenderung memenuhi salah satu tujuan *comparative education* yang bertujuan menghasilkan saran bagi perbaikan sistem pendidikan di negeri tercinta. Dalam bagian ini tidak akan dibahas mengenai sistem pendidikan Indonesia secara rinci melainkan akan lebih membahas kajian komparatif dengan sistem pendidikan Jerman.

Secara umum sistem pendidikan Jerman dan sistem pendidikan Indonesia tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Sistem pendidikan dibangun di atas prinsip

pendidikan dan keilmuan yang relatif sama, namun dengan ideologi dan kekhasan budaya yang berbeda. Berikut adalah beberapa catatan sederhana mengenai kajian banding sistem pendidikan di antara dua negara tersebut.

2.3.1 Pendanaan

Perbedaan pertama antara sistem pendidikan di Jerman dan di Indonesia, juga seringkali dijadikan alasan utama bagi perbaikan pendidikan adalah masalah biaya. Mungkin memang merupakan hal yang *recurrent*, namun baru saat ini ada titik terang dengan pembebasan biaya pendidikan dalam tingkatan tertentu. Mewajibkan sesuatu sudah barang tentu harus kepada orang yang mampu melaksanakan. Wajib belajar 9 tahun di Indonesia saat ini masih belum bisa memenuhi rumus tersebut. Walaupun biaya SPP bebas, masyarakat masih mengeluhkan besarnya biaya lain yang harus dibayarkan dalam menempuh pendidikan dasar. Di Jerman, pembebasan biaya pendidikan dilakukan melalui kebijakan subsidi silang. Kebijakan ini terbukti ampuh meningkatkan partisipasi penduduk Jerman yang berimbang pada angka *human development index* yang membanggakan.

Bila masalah biaya kemudian disepelekan, maka bisa kita lihat bahwa negara-negara dengan peringkat pendidikan papan atas, seperti Finlandia sebenarnya memiliki alokasi anggaran pendidikan yang relatif tinggi. Merendahkan masalah ini dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan terhadap fenomena guru yang merangkap tukang ojek di Indonesia. Masalah pendanaan pendidikan juga akan berimbang langsung terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu daya tarik pendidikan Jerman adalah tersedianya semua sarana yang dibutuhkan untuk melatih keterampilan, praktek pendidikan, dan pendukung keilmuan.

Adalah sebuah kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan SDA. Penyair menyampaikan bahwa tongkat kayu dan pagar di Indonesia bila ditancapkan ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman, namun tanpa kecerdasan dalam mengelolanya, maka semua potensi kekayaan tersebut menjadi mubazir, bahkan malah dimanfaatkan oleh negara lain seperti yang terjadi di kilang minyak Aceh, blok Cepu atau tembagapura yang sebenarnya merupakan tambang emas yang sangat besar. Harus ada *political will* yang besar dan istiqomah dari segenap pengambil kebijakan agar anggaran pendidikan bisa tetap mempunyai proporsi yang relevan. Saat ini, arah menuju perbaikan dalam bidang pendanaan sudah tampak dengan adanya perbaikan

kesejahteraan pengajar dan pembebasan biaya pendidikan di beberapa daerah. Ini adalah kebaikan yang harus dipupuk dengan dorongan dan partisipasi masyarakat luas.

2.3.2 Permasalahan Metode dalam Sistem Pendidikan Nasional

Presiden SBY sempat melontarkan kritik terhadap sistem pendidikan nasional yang menurutnya kurang mengembangkan kreatifitas siswa saat membuka temu nasional 2009 di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 (www.kapanlagi.com. Diakses pada tanggal 17 November 2009).

"Saya ingatkan Mendiknas, coba sejak TK, SD, SMP, SMA itu metodologinya jangan guru aktif siswa pasif, dan hanya sekedar mengejar ujian, rapor. Kalau itu yang dipilih, maka anak-anak bersekolah tidak berkembang kreativitasnya, inovasi dan jiwa wirausahanya,"

Lebih lanjut disampaikan bahwa jiwa wirausaha atau *entrepreneurship* merupakan hal yang sangat penting dan harus dipupuk sejak kecil, sehingga pendidikan nasional tidak hanya melahirkan para pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja. Bila kita cermati sistem pendidikan Jerman biasa kita lihat bahwa sistem menyediakan pilihan yang komperhensif bagi siswa, apakah mau menjadi ilmuwan atau menjadi seorang yang siap kerja dengan keahlian khusus setelah melalui pendidikan. Semua siswa melalui tes penentuan minat bakat terlebih dahulu sebelum kemudian memilih jalur sekolah yang akan diambil. Hasil tes menjadi bahan pertimbangan bagi siswa dan orang tuanya untuk menentukan pilihan. Kelemahan dari sistem Jerman ini adalah beban memilih yang sudah diberikan sejak siswa lulus *Grundstufe*, sehingga di usia muda mereka sudah harus tahu arah pendidikannya mau ke mana. Meskipun begitu, sistem pendidikan Jerman juga menyediakan kemungkinan siswa yang ingin mencoba keduanya.

Keuntungan lain dari pembagian ini adalah terfokusnya pengetahuan atau keterampilan siswa akan satu hal. Jadi siswa mempunyai pengetahuan yang mendalam di satu atau beberapa bidang tertentu, tidak seperti di Indonesia dimana tingkat SMP masih bersifat tahu sedikit dari banyak bidang. Pendidikan juga masih diwarnai oleh hal-hal yang bersifat trivial semacam kesibukan siswa SD menghafalkan nama-nama menteri dalam kabinet yang kadang akhir-akhir ini pergantiannya lebih cepat dibandingkan kecepatan siswa SD menghafalkan nama seluruh menteri dalam satu kabinet.

Di Indonesia, pembagian alur dimulai sejak masuk sekolah menengah atas, dimana pendidikan terbagi menjadi dua jalur, yaitu sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. Kritik yang disampaikan presiden lebih menitikberatkan sisi pelaksanaan dimana guru dan dosen diajak untuk ikut mengembangkan sisi kreatifitas, inovatif dan kewirausahaan siswa.

2.3.3 Pengajaran Nilai Sikap dan Bukan Pengejaran Nilai Raport

Setelah kekalahan Perang Dunia II, Jerman benar-benar mengalami kehancuran yang mengerikan. Di Berlin, sulit menemukan bangunan yang masih mempunyai atap. Kondisi masyarakat mengalami perubahan yang luar biasa akibat kematian banyak sekali kaum pria sehingga meninggalkan kaum wanita di antara reruntuhan. Nilai pertama yang mereka tanamkan adalah kemauan yang kuat, kesiapan untuk bekerja keras dan keyakinan akan urgensi pendidikan. Ketiga nilai ini masih menjadi tradisi yang mengakar kokoh dalam budaya pendidikan Jerman, sehingga sulit kita menemukan fenomena dosen atau siswa yang terlambat masuk kelas atau kelompok mahasiswa yang berkerumun mengobrol di tangga gedung-gedung perkuliahan. Sikap mandiri juga tercermin dalam tata kurikulum yang terbuka, dan mempersilakan sepenuhnya kepada mahasiswa, mata kuliah mana yang akan dikontrak dan kapan.

Pendidikan nilai di Indonesia memang memiliki alokasi yang minim. Sebagai contoh, selama 4 tahun kuliah di pendidikan tinggi di Indonesia, pembelajaran nilai umumnya hanya selama 2 sks dalam satu semester. Menurut beberapa pengamat pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia masih membuat pengdikotomian terhadap pendidikan nilai dan pendidikan sekuler. Pendidikan nilai umum diajarkan di pesantren misalnya, dan tidak terintegrasi dengan pendidikan di lembaga non-keagamaan. Di lembaga pendidikan formal non-keagamaan pun, penanaman sikap dinilai kurang. Siswa dan guru lebih terfokus pada nilai raport dan UN, sehingga nilai menjadi segala-galanya di Indonesia.

2.3.4 Manajemen Pendidikan

Wewenang untuk mengambil kebijakan prinsipil dalam bidang pendidikan di Indonesia masih dipegang oleh pemerintahan pusat. Artinya, pemerintahan daerah belum berani mengambil otoritas untuk menentukan masa pendidikan dasar atau corak seragam di sekolah formal. Ini bisa menjadi sebuah hal yang positif di Indonesia, mengingat dengan demikian standarisasi pendidikan di manapun di Indonesia

seyogyanya sama. Di Jakarta atau di Manokwari, semestinya standar pendidikan untuk tingkat sekolah dasar sama, sehingga kemampuan siswapun setara. Di Jerman perbedaan masa pendidikan dasar (ada yang 9 ada juga yang 10 tahun) melahirkan perbedaan masa pendidikan.

Kebijakan penempatan guru di Indonesia masih menyisakan PR dalam bidang relevansi dan kualitas. Terkadang guru yang mengajar tidak mempunyai kapabilitas yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, atau relevan namun kualitasnya belum memadai untuk menjadi guru. Program sertifikasi *insya Allah* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan semacam ini.

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan masih kurang. Hal ini didorong oleh anggapan bahwa pendidikan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah dan bukan masyarakat. Hal ini menjadi sulit mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah menghambat terwujudnya sistem pendidikan yang ideal dalam ranah konsep dan teknis. Di Jerman, kontribusi masyarakat sudah menjadi budaya yang mengakar dalam dunia pendidikan. Partisipasi aktif ini muncul dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat urgen, sehingga tidak mau mengambil resiko membahayakan kualitas pendidikan.

3. Simpulan

Sistem pendidikan Indonesia saat ini memang berada di peringkat yang kurang membanggakan. Dalam laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang pendidikan, *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), yang dirilis pada hari Kamis tanggal 29 November 2007 lalu, peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia. *Education development index* (EDI) Indonesia adalah 0.935, di bawah Malaysia (0.945), Brunei Darussalam (0.965) dan Jerman (0.994).

Kondisi jelas bukan merupakan alasan untuk terus merasa terpuruk, karena sistem pendidikan Indonesia juga telah menghasilkan juara-juara olimpiade di bidang Matematika, Fisika dan Biologi. Artinya, Indonesia masih mempunyai potensi yang bila dikelola dengan baik akan berubah menjadi kekuatan yang bisa mengimbangi negara-negara maju.

Salah satu upaya yang bisa dijadikan *starting point* bagi upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan mengetahui kelemahan dan kelebihanannya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kaji banding dengan sistem negara lain yang lebih baik, sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita, bagaimana kita bisa memperkuat yang menjadi kelebihan sistem pendidikan Indonesia dan memperbaiki kekurangan yang ada. Melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia, kelak Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berada di barisan terdepan dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. 2008. *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung:Rosda.

in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. 2009. *Tatsachen über Deutschland*.
Frankfurt am Main: Societäts-Verlag

Lin-Huber, Margrith A. 1998. *Kulturspezifischer Spracherwerb*. Bern: Verlag Hans
Huber.

Syah Nur, Agustiar. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung:
Lubuk Agung.

Artikel “*Indonesia’s education equity goals ‘moderate’, UNESCO report shows*”. The
Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008

www.unesco.org

<http://www.kapanlagi.com/h/presiden-kritisi-sistem-pendidikan-nasional.html> diakses
pukul 8.42 WIB

Artikel “*Peringkat Pendidikan Turun dari 58 ke 62*” Jawa Post edisi 12 Desember 2007

TUGAS KELOMPOK

STUDI PENDIDIKAN MANCANEGARA JERMAN DAN INDONESIA

**Diajukan untuk memenuhi tugas kelompok
Mata Kuliah: Studi Komparatif Sistem Pendidikan Nasional
Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. A. Azis Wahab, M.A.**

Disusun oleh:

- 1. CECEP WAHYU HOERUDIN (NIM: 0908077)**
- 2. ROCHMAT TRI SUDRAJAT (NIM: 0907619)**
- 3. SETIAWAN (NIM: 0907970)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2009**